

Demagogi dan Kepemimpinan Filsuf: Kritik Plato atas Demokrasi dan Relevansinya bagi Politik Kontemporer

Muhammad Yasser

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Daarul Fatah Tangerang

Email: penerbityes@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 03 Mei 2025
Revisi: 20 Juni 2025
Terbit: 14 Februari 2026

Kata Kunci:

Plato
Kepemimpinan
Demokrasi
Filsafat Politik
Paideia
Filsuf-Raja

ABSTRACT

This research examines the characteristics of an ideal leader in the political philosophy of Plato. This particular theme is important to raise considering that our nation is currently facing a leadership crisis. The focus of this research includes questions: how does Plato view the ideal leader; what characteristics are inherent in the ideal leader; and how to produce such an ideal leader. In addition to these core questions, this article also highlights Plato's harsh criticism of the democratic system which he considered often produces demagogues and even tyrants, and the importance of a proper education system to produce candidates for future leaders. To do this, the author uses the library research methods and Gadamerism hermeneutics conducted on several of Plato's dialogues related to his political philosophy thoughts as well as other relevant sources.

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema karakter pemimpin yang ideal dalam pandangan Plato. Tema ini penting untuk diangkat mengingat problem bangsa ini yang sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Pertanyaan yang menjadi perhatian penelitian ini meliputi: bagaimana pandangan Plato terkait pemimpin yang ideal tersebut; karakter apa saja yang melekat pada pemimpin ideal tersebut; dan bagaimana cara melahirkan pemimpin ideal seperti ini. Di samping pertanyaan inti tersebut, artikel ini juga menyoroti kritik keras Plato terhadap sistem demokrasi yang dianggapnya kerap melahirkan pemimpin demagog dan bahkan tiran, dan pentingnya sistem pendidikan yang tepat untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa masa depan. Untuk melakukan hal ini penulis menggunakan metode kualitatif-kepastakaan dan hermeneutika Gadamerisme yang dilakukan terhadap beberapa dialog Plato terkait pemikiran filsafat politiknya dan sumber lainnya yang relevan.

A. PENDAHULUAN

Dalam kunjungan apostolik (kerasulan) nya di Indonesia tertanggal 3-6 September 2024 yang lalu, Paus Fransiskus memberi pesan yang amat menohok terkait kepemimpinan (*leadership*), “The most important qualification for being a leader is not wanting to be a leader (syarat terpenting menjadi seorang pemimpin justru adalah tidak ingin menjadi pemimpin).” Pesan ini menjadi penting di tengah hiruk-pikuk perebutan kekuasaan di negara ini menjelang Pilpres 2024 yang menisbahkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai pemenang konstentasi tersebut. Sebagaimana diketahui, Prabowo akhirnya memenangkan konstetasi ini setelah kekalahan pada tahun 2009 (sebagai calon wakil presiden), 2014 dan 2019 (sebagai calon presiden), dan Gibran menjadi wapres setelah melalui beberapa kontroversi sebagai anak dari presiden sebelumnya yang berkuasa (Tempo, 2024). Apa yang diingatkan oleh Paus Fransiskus ini juga sebenarnya pernah dikumandangkan oleh salah-satu pendiri bangsa Mr. Kasman Singodimejo pada tahun 1925 ketika berkunjung ke rumah kontrakan Agus Salim, “Een leidersweg is een lydensweg. Leiden is lijden (jalan memimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu artinya menderita).” Alih-alih menjadi ajang perebutan dan bagi-bagi kekuasaan, menjadi pemimpin semestinya dipandang sebagai amanat yang sangat berat dan hanya bisa dipikul oleh beberapa orang terbaik di generasinya; bahwa kekuasaan adalah mandat yang harus diemban dalam wujud kepedulian kepada sesama, bukan terhadap kelompok apalagi keluarga sendiri (Sesawi, 2024).

Krisis kepemimpinan yang sedang melanda bangsa saat ini sejatinya pernah menimpa pula polis Athena pada masa Plato, yang menyebabkan kematian guru yang amat dicintainya, Sokrates, sebagai simbol perjuangan kebenaran dan kebebasan berpikir sekaligus juga kegagalan moral demokrasi Athena—sebagaimana dikisahkan dalam salah-satu dialog Plato berjudul *Apologia*, Sokrates sebenarnya bisa saja melarikan diri dari hukuman mati ini dengan cara keluar dari Athena, tapi ia menolak dengan dalih ia tidak bersalah dan karenanya tidak seharusnya kabur. Plato sendiri hidup ketika Athena sedang mengalami turbulensi politik akibat transisi kekuasaan, mulai dari membusuknya demokrasi yang telah terbina sejak zaman Perikles (pemimpin agung Athena di masa keemasannya, sesaat sebelum kelahiran Plato, berkuasa antara tahun 461-429 SM), berkuasanya oligarki yang brutal di bawah rezim 30 Tyrannoi (rezim 30 Tiran yang diangkat seiring dengan kekalahan Athena atas Sparta), hingga restorasi kembalinya demokrasi. Sistem politik yang begitu dicintai Sokrates dan Plato, ternyata membawa malapetaka ketidakadilan yang berujung pada kematian warganya yang memperjuangkan kebenaran; dan di sisi lain naiknya orang-orang yang tidak berkompeten (namun memiliki kelihaihan berorasi ala sophis yang mampu menarik perhatian orang banyak) sebagai pemimpin polis (Wibowo, 2010).

Hal yang sama sesungguhnya sedang terjadi pada bangsa ini, sejak pulihnya sistem demokrasi paska Orde Baru dengan memasuki iklim reformasi, bangsa Indonesia saat ini justru menemukan dirinya kembali terjerembab dalam kekuasaan oligarki. Pembersihan demokrasi ini tidak terlepas dari “normalisasi” berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan secara merata, mulai dari level nasional hingga lokal, oleh para politisi hingga para pemimpin instansi pemerintahan itu sendiri. Demikianlah masyarakat

melihat berbagai tindak KKN yang dilakukan secara terang-terangan, mulai dari korupsi dan politisasi Bansos (bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah yang berkuasa, yang sumbernya berasal dari rakyat juga tapi diklaim pihak tertentu), bagi-bagi jabatan kelompok pemenang pemilu, hingga manipulasi dan rekayasa konstitusi demi meloloskan ambisi berkuasa para penguasa. Terakhir, bersamaan dengan disusunnya artikel ini, pemerintah masih saja menolak menetapkan status bencana nasional pada musibah banjir besar Sumatera yang telah memakan korban lebih dari 1000 orang, ratusan orang lainnya hilang, dan ratusan ribu terkena dampaknya, hingga lumpuhnya roda ekonomi di berbagai wilayah terdampak, dengan alasan prosedur, rekomendasi lembaga terkait, dan teknis pelaksanaan; padahal masyarakat sendiri dapat menilai musibah tersebut terjadi karena ulah pembalakan liar, perubahan fungsi hutan dan penambangan ilegal yang terkesan dilindungi pemerintah (Netral, 2025).

Disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. Walaupun sudah banyak penelitian dilakukan perihal filsafat politik Plato, namun masih langka yang secara khusus membahas sosok pemimpin yang ideal terutama dalam konteks keindonesiaan saat ini yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurut Plato, untuk membentuk sebuah negara yang ideal maka diperlukan pemimpin yang memiliki karakteristik elok dan baik (*kaloskagathos*), dimana untuk menghasilkan sosok pemimpin seperti ini tidak terlepas dari proses pendidikan yang tepat. Tidak seperti sistem pendidikan saat ini yang memperlakukan anak didik tak ubahnya kertas putih yang kosong, sistem pendidikan yang ideal justru “menginspirasi” lahirnya bakat-bakat (potensi) yang terpendam dalam diri setiap anak didik. Ergo, pemimpin bukan sekadar produk dari proses pendidikan yang tepat tapi juga bakat atau bawaan dari lahir (natural born leader). Sekalipun pelajaran kepemimpinan (*leadership*) dapat diberikan kepada setiap orang, namun hanya sosok tertentu yang sepantasnya memimpin sebuah negara sebagai seorang negarawan (*statesman*). Dari sini dapat dipahami bahwa terdapat korelasi yang erat dalam filsafat Plato antara pendidikan dan politik (Wibowo dan Cahyadi, 2014).

Dengan demikian penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan krusial: seperti apa filsafat politik Plato dan urgensi mempelajarinya dalam konteks keindonesiaan saat ini? Bagaimana sosok pemimpin yang ideal dalam pandangan Plato? Dan akhirnya, bagaimana cara melahirkan sosok pemimpin yang ideal seperti ini, atau setidaknya mendekati kualitas-kualitas ideal tersebut?! Lain dari itu, penulis juga berkeyakinan bahwa bangsa ini memerlukan semacam “buku panduan” dalam menentukan pilihan pemimpin yang baik, dan tidak sekadar menentukan pilihannya berdasarkan transaksi-transaksi jangka pendek. Hal ini berlaku bukan saja dalam level nasional—yang tidak secara langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari rakyat jelata—tapi juga dalam skala kecil dan lokal, mulai dari menentukan pilihan terkait ketua lingkungan setempat hingga sekadar ketua organisasi pemuda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpretensi untuk menjawab pertanyaan mayor, bagaimana pemimpin yang ideal dalam skema filsafat politik Plato. Untuk melakukan hal ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka (*library research*). Penulis

mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, mencakup buku, jurnal dan dokumen tertulis lainnya sesuai dengan tema yang diangkat, dalam rangka memahami sebuah fenomena secara mendalam, deskriptif dan kontekstual. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menggunakan data statistik (kuantitatif), melainkan analisis teks dalam rangka menghasilkan temuan yang deskriptif-analitis berdasarkan teori dan konsep yang relevan.

Dalam rangka mencapai pemahaman dimaksud, maka penulis menggunakan metode hermeneutika Gadamerian oleh Hans-Georg Gadamer. Dalam perspektif Gadamerisme seperti ini, pengetahuan tidak lagi dipahami sebagai obyektifikasi pengalaman yang bersifat netral—dalam artian, pengetahuan saintifik yang obyektif dan terverifikasi—melainkan suatu pengalaman hermeneutis (*hermeneutical experience*) sebagai proses fundamental-ontologis ketika terjadi perjumpaan transformatif, peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) antara teks dan pembaca, sehingga terjadi kesepakatan pemahaman (*verstehen*) yang selalu “segar” dan penuh akan makna (*value-laden*). Dengan demikian, pengetahuan yang sarat nilai seperti ini tidak semata bersifat subyektif melainkan sekaligus juga universal historis-kultural. Hal ini senada dengan pandangan Plato sendiri perihal pencarian makna kebenaran yang tak berkesudahan—karena pengetahuan manusia selalu terikat pada bahasa—melalui suatu proses dialektika berdasarkan argumentasi filosofis (Palmer, 1988).

Sebagai sumber primer, tentu saja, penulis akan merujuk langsung pada beberapa karya dalam bentuk dialog oleh Plato sendiri. Untuk keperluan ini penulis menggunakan terjemahan ke dalam bahasa Inggris berjudul *Plato Complete Works* oleh John. M. Cooper (ed.) (1997). Namun mengingat tingkat kesulitan dalam memahami berbagai teks tersebut, penulis juga akan bergantung kepada beberapa sumber lainnya dalam rangka memahami lebih jauh pemikiran filsafat politik dari Plato. Sumber-sumber dimaksud, yang perlu disebut disini, adalah *Mendidik Pemimpin dan Negarawan* oleh A. Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi (2017) dalam rangka memahami pemikiran Plato mengenai pentingnya pendidikan sebagai seleksi alamiah dalam menghasilkan pemimpin yang ideal; dan *Models and Leadership in Plato and Beyond* oleh Dominic Scott dan R. Edward Freeman (2021) mengenai berbagai karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Plato. Hal ini tanpa memperkecil peran beberapa artikel ilmiah lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN DISKUSI

Filsafat Politik Plato

Plato (428/7-348/7 SM) lahir dan berkarir sebagai filsuf hampir sepanjang hidupnya di salah-satu polis terbesar di Yunani ketika itu, Athena. Ia berasal dari keluarga aristokratik yang terlibat secara aktif dalam dunia politik di Athena, bahkan Plato sendiri dipersiapkan untuk menjadi seorang politikus; namun ketidakstabilan politik dan suasana mencekam di Athena ketika itu—yang sedang berada dalam kondisi Perang Peloponnesos—membuatnya mengambil keputusan untuk menjalani hidup secara lebih kontemplatif (Takala, 1997). Istilah polis itu sendiri dapat diartikan sebagai negara-kota (*city-states*) yang saling berdiri sendiri di seluruh wilayah yang disebut negara Yunani saat ini ditambah Asia Minor (bagian barat negara Turki), Sisilia (di Italia), hingga Afrika Utara (termasuk juga pulau-pulau di antaranya). Athena merupakan salah-satu polis terbesar ketika itu, dengan penduduk laki-laki

mencapai hingga 50.000 orang—polis lainnya yang menjadi saingan dari Athena, sebagai satu dari dua yang terkuat, adalah Sparta. Berbagai polis di Yunani ini berdiri sendiri-sendiri tapi disatukan oleh kesamaan bahasa dan agama, dan *common enemy* di Timur, yaitu Persia, yang memiliki wilayah yang amat luas mencakup Turki hingga Iran saat ini (Scott dan Freeman, 2021).

Jauh dari kata bersatu, berbagai polis yang ada di Yunani tersebut kerap kali berada dalam situasi rivalitas dan bahkan peperangan satu sama lain. Namun lima dekade sebelum kelahiran Plato—sekitar 480-478 SM—beberapa polis di Yunani membentuk aliansi Liga Delian untuk membendung ancaman Kerajaan Persia dari Timur, di bawah komando Athena sebagai polis yang terbesar (Sparta tidak termasuk dalam aliansi ini). Di bawah tangan dingin Perikles, pemimpin agung Athena, aliansi ini mencapai kesuksesan dalam membendung serangan dari Persia, namun pada gilirannya mengubah watak Athena menjadi tiran yang menjajah polis-polis lainnya—dimana apabila ada polis yang hendak keluar dari Liga, maka Athena dengan kekuatan militernya tidak akan segan melakukan invasi terhadap polis tersebut. Pada satu sisi hal ini telah membawa kemakmuran yang luar biasa terhadap masyarakat Athena ketika itu sebagai pusat peradaban Yunani; namun di sisi lain meninggalkan bara yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan Athena dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) (Scott dan Freeman, 2021).

Demikianlah Plato kemudian menjadi saksi mata dari merosotnya kehidupan berdemokrasi di Athena (seiring dengan kematian Perikles hanya setahun sebelum kelahirannya), kekuasaan singkat namun brutal era 30 Tiran akibat kekalahan dari Sparta dalam Perang Peloponnesos, dan restorasi kehidupan berdemokrasi (yang justru membawa kematian kepada guru yang amat dicintainya, Sokrates, akibat keputusan bersalah dari suatu pengadilan yang demokratis). Kematian Sokrates ini amat mempengaruhi psikologi dari Plato muda sehingga mendorongnya untuk melakukan ziarah selama 12 tahun ke berbagai wilayah di Yunani, sebelum kemudian kembali ke Athena dan mendirikan pusat pendidikan filsafat Akademia (Andariati, 2020). Pada titik inilah, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, Plato menawarkan pemikirannya perihal karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin sekaligus cara melahirkan model pemimpin seperti ini.

Karya utama Plato berkenaan dengan filsafat politik dapat ditemukan dalam dialognya berjudul Republik (*Politeia*). Dalam karyanya ini ia bicara tentang negara ideal (*kallipolis*) yang akan terwujud apabila setiap kelas dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa saling mencampuri—kata kuncinya disini adalah ditegakkannya keadilan (*dikaiousone*) (Grube, 1997). Menurut Plato, sebagaimana halnya jiwa manusia, sebuah negara yang adil mesti memiliki tiga kelas yang saling melengkapi, kelas pekerja, kelas penjaga dan kelas pemimpin. Sebuah negara yang baik tak ubahnya jiwa yang baik, mestilah dipimpin oleh kalangan filsuf yang memiliki keutamaan secara logistikon; dijaga keamanannya oleh kalangan militer yang memiliki keutamaan secara thumos; dan disokong kehidupannya sehari-harinya oleh kalangan pedagang dan petani yang memiliki keutamaan secara epithumia (abdomen). Keadilan itu sendiri diartikan sebagai harmoni atau keselarasan antara berbagai unsur yang terdapat dalam jiwa seorang manusia, dan dalam konteks politik sebagai harmoni antara berbagai kelas dalam masyarakat. Dengan ditegakkannya keadilan

maka dengan sendirinya kehidupan yang baik, makmur dan bahagia (sebagai cita-cita dibentuknya negara itu sendiri) dapat terwujud (Pute, 2023).

Penekanan Plato pada prinsip spesialisasi kelas dalam masyarakat seperti ini membawanya kepada penolakan terhadap demokrasi. Menurut Plato, tujuan prinsipil terbentuknya sebuah negara adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakatnya—negara sebagai konsekuensi logis dari *nature* manusia itu sendiri yang tidak *self-sufficient* alias saling membutuhkan satu sama lain, *zoon politikon*—dan karenanya hal ini hanya dapat terwujud secara maksimal apabila setiap orang saling berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan sifat (*nature*) dan pola perilakunya (*temperament*) masing-masing. Lebih jauh, Plato juga berpandangan bahwa hasil yang diperoleh akan lebih maksimal apabila setiap orang terspesialisasi dalam satu bidang yang sesuai dengan sifat dan temperamennya tersebut.

Dengan kata lain, demikian Plato, negara akan menjamin setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut, tapi tidak serta-merta mendapatkan hak politik yang sama. Seperti halnya tidak semua orang bisa membuat sebuah kapal yang megah karena diperlukan keahlian tertentu, demikian halnya dalam urusan politik tidak semestinya setiap orang bisa membuat keputusan yang paling adil bagi masyarakat luas dalam sebuah negara melainkan hanya oleh segelintir orang yang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Ketika setiap anggota masyarakat dapat menjalankan tugasnya secara fokus seperti ini, maka akan tercipta harmoni dan kesatuan di antara mereka sebagai syarat utama terbentuknya negara yang ideal (Wibowo dan Cahyadi, 2014).

Spesialisasi kelas masyarakat ala Plato seperti ini bukan saja menutup ruang terjadinya dualisme kepentingan—sebagaimana jamaknya terjadi dalam politik transaksional yang marak di negeri ini—tapi juga menuntut adanya keahlian (*expertise*) tertentu yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dalam dialog *Republic*, Plato mengibaratkan seorang pemimpin sebagai tak ubahnya seorang dokter (yang mampu mendiagnosis “penyakit” masyarakat dan sekaligus memiliki obatnya), navigator (yang memiliki kemampuan membaca pergerakan bintang-bintang sehingga kapal dapat berjalan pada arahnya) dan guru (yang mampu mengajari murid-muridnya berbagai ilmu yang diperlukan dalam kehidupannya) secara sekaligus. Dalam perspektif seperti ini, sistem pemilu—sebagaimana jamak dijalankan di berbagai negara demokratis modern, termasuk Indonesia—menjadi sesuatu yang absurd karena cenderung menghasilkan pemimpin yang populis dan transaksional alih-alih pemimpin transformasional yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi rakyat yang dipimpinnya (Bass, 1990).

Akhirnya, menjawab pertanyaan bagaimana cara melahirkan model pemimpin yang ideal seperti ini—yang bukan saja memiliki keahlian mumpuni (*expertise*) tapi juga mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari seluruh elemen masyarakat—Plato mengajukan suatu skema pendidikan tertentu sebagai proses seleksi alamiah calon-calon pemimpin masa depan, dimana lewat skema pendidikan dimaksud maka akan tersaring individu-individu terbaik generasi masa depan bangsa yang dapat berkontribusi secara maksimal bagi negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bagi Plato negara yang baik adalah seperti tubuh

yang baik, dimana rasa sakit yang diderita pada satu organ tertentu akan berpengaruh pada yang lainnya, sehingga diperlukan harmoni (keselarasan) dan kesatuan di antara berbagai elemen masyarakat. Penulis akan kembali pada persoalan ini pada bab berikutnya.

Karakteristik Pemimpin Ideal

Sepanjang abad modern sendiri teori kepemimpinan mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa nama yang perlu disebutkan disini karena pengaruhnya yang besar, antara lain, Niccolo Machiavelli (1446-1527) dalam karyanya “The Prince”; Thomas Carlyle (1795-1881) dalam karyanya berjudul “On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History”; hingga Francis Galton dengan karyanya “Genius Hereditary: An Inquiry into its Laws and Consequences.” Machiavelli mengemukakan setidaknya terdapat tiga karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: (i) seorang pemimpin lebih baik ditakuti daripada dicintai; (ii) memiliki dukungan yang populer, antara lain, dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyatnya; (iii) pemimpin semestinya cerdas (*clever*), terpelajar (*intelligent*) dan memiliki kualitas moral yang baik (*good virtues*). Ia juga menekankan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk bisa menjalin komunikasi yang baik sehingga rakyatnya bisa menyuarakan kebenaran tanpa merasa takut menyinggung personalnya, dan mampu memimpin lewat keteladanan. Pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan “cinta” dari rakyatnya karena sifatnya yang emosional dan tidak bisa menjadi pegangan; namun di sisi lain, Machiavelli juga menekankan agar rasa takut itu tidak disertai pula oleh kebencian karena kesewenang-wenangan (pemimpin diktator), melainkan karena adanya kepastian hukum, stabilitas, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Mengutip pernyataan Machiavelli sendiri, “*Nothing gives a prince more prestige than undertaking great enterprises and setting a splendid example for his people.*” (Dias, 2022)

Sementara itu Carlyle menjadikan sosok-sosok seperti Nabi Muhammad, Dante, Martin Luther hingga Napoleon Bonaparte sebagai contoh riil pemimpin yang ideal. Dalam gambarannya tersebut, ia mengasosiasikan para pemimpin sebagai tak ubahnya pahlawan (*leader as hero*), dengan penekanannya pada atribut personal kepemimpinan. Nabi Muhammad, misalnya, dipandang Carlyle sebagai salah-satu contoh riil pemimpin yang ideal (*the hero as prophet*), karena beberapa atribut kepemimpinan yang melekat pada dirinya: ketulusan (*deep sincerity*), dalam artian tidak mudah tergoda oleh berbagai kenikmatan duniawi; orisinalitas, dalam artian tidak sekadar mengkopi mentah-mentah berbagai ajaran agama sebelumnya tapi juga mempelajarinya langsung dari “jiwa alam semesta”; kehidupan sederhana, dimana seluruh aspek kehidupan Nabi dapat menjadi teladan bagi umatnya; dan kemampuan unik sang Nabi dalam “mengubah pasir menjadi bubuk mesiu”, dalam artian mempersatukan seluruh bangsa Arab menjadi peradaban besar yang membentang dari Delhi ke Granada (Mulky, 2025). Senada dengan itu, Francis Galton—yang hidup di tengah-tengah gegap gempita teori evolusi Charles Darwin dan hukum genetika oleh Gregory Mendel—juga menekankan betapa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibesarkan atau diajarkan (*nature vs nurture theory*). Untuk mendukung pernyataannya ini ia melakukan studi etnologi terhadap tidak kurang dari 400 pemimpin, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kejeniusan merupakan faktor keturunan (selaras dengan teori seleksi alam dan genetika) (Dias, 2022).

Lalu bagaimana dengan pemikiran Plato sendiri, apakah baginya pemimpin yang ideal itu dilahirkan (*nature theory*) ataukah bisa dibentuk lewat suatu proses pendidikan tertentu (*nurture theory*). Disinilah letak menariknya pandangan Plato, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, di satu sisi ia meyakini bahwa sosok pemimpin itu dilahirkan—artinya, ada sosok-sosok manusia tertentu yang memiliki kualitas kepemimpinan yang inheren, *natural born leader*—namun di sisi lain bukan berarti seorang pemimpin yang hebat mesti melahirkan keturunan yang memiliki bakat kepemimpinan yang sama, melainkan harus melewati seleksi alamiah dalam suatu proses pendidikan yang berjenjang sehingga memiliki legitimasi. Penulis akan kembali pada persoalan ini pada bab berikutnya. Pertanyaan yang perlu dijawab disini adalah seperti apa karakter yang diharapkan Plato terdapat dalam sosok pemimpin yang ideal tersebut (*philosopher-king*)?!

Dalam bukunya berjudul *Models of Leadership in Plato and Beyond* (2021), Scott dan Freeman merangkum setidaknya terdapat tujuh model kepemimpinan dalam berbagai dialog Plato. Selain pemimpin sebagai dokter, navigator dan guru (sebagaimana telah disinggung di bab sebelumnya), juga pemimpin sebagai seniman (*leader as the artist*) yang memiliki visi kreatif dan integritas tapi sekaligus juga bersifat realistis akan limitasi praktis di lapangan; sebagai penenun (*leader as the weaver*) yang mampu merajut berbagai karakter, bakat dan kelompok dalam kesatuan tim yang harmonis; sebagai penyemai (*leader as the sower*) yang fokus dalam menanam ide dan inisiatif sehingga mampu menginspirasi orang lain untuk tumbuh bersama-sama dalam menjalankan berbagai program yang berkelanjutan; dan akhirnya pemimpin sebagai gembala (*leader as shepherd*) yang mampu memimpin rakyatnya alih-alih mengeksploitasinya demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Menariknya, Scott dan Freeman juga menemukan bahwa berbagai karakter dimaksud (yang disampaikan Plato lewat ketujuh analogi di atas) bersifat fleksibel dan dinamis. Artinya, satu karakter cocok dijalankan pada kondisi tertentu namun tidak pada kondisi lainnya. Hal ini sekaligus juga menunjukkan adanya perkembangan dalam pemikiran Plato sendiri, yang alih-alih bersifat saling meniadakan atau bertentangan satu sama lain, justru bersifat komplementaris dalam melihat tanggung-jawab seorang pemimpin yang amat kompleks dimana penguasaan atas satu model akan memperkuat model kepemimpinan lainnya (Scott dan Freeman, 2021). Berikut penjelasan lebih memadai terkait berbagai karakter kepemimpinan Plato:

1. **Pemimpin sebagai dokter (*the doctor*).** Analogi pemimpin sebagai dokter ini dapat ditemukan dalam dialog Plato berjudul *Gorgias* (yang ditulis ketika ia masih muda), *Republic* (usia matang) dan *Laws* (usia lanjut). Sebelum dapat memahami seutuhnya maksud Plato di sini, perlu dipahami terlebih dahulu perkembangan dunia medis di Yunani ketika itu. Di masa Plato, telah menjadi pandangan umum bahwa kesehatan adalah buah dari tercapai dan terjaganya keseimbangan antara berbagai elemen dalam tubuh—berbagai elemen dimaksud adalah *humor* (cairan dalam tubuh) yang meliputi darah, cairan empedu kuning (*yellow bile*), cairan empedu hitam (*black bile*) dan lendir (*phlegm*), dimana setiap elemen ini memiliki sifat dan fungsinya masing-masing bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tak hanya itu kadar yang berbeda-beda dari berbagai elemen ini pada seorang manusia akan menentukan sifat atau temperamen

dari orang tersebut (humorisme). Tugas seorang dokter adalah memastikan terciptanya keteraturan (kosmos) antara berbagai elemen tersebut, yang dilakukan dengan cara mengendalikan berbagai keinginan terhadap hal-hal yang mungkin saja memberikan efek kenikmatan jangka pendek tapi keburukan untuk jangka panjang. Kata kuncinya disini adalah menjaga moderasi dalam hidup, dengan cara memenuhi secara terbatas dan terkendali berbagai keinginan dalam hidup (seperti makan, minum, seks dan lainnya) dan memastikan emosi selalu berada di bawah tuntunan akal sehat (Scott dan Freeman, 2021).

Dalam dialog *Republic*, Plato mengkritik keras kebijakan imperialisasi yang dilakukan oleh Pemimpin Agung Athena, Perikles, yang demi memenuhi tuntutan populis dari rakyat untuk memperluas daerah kekuasaannya, ergo menaikan pajak polis-polis di bawah kekuasaannya. Kebijakan ini memang pada awalnya nampak menguntungkan bagi Athena, yang mencapai masa keemasannya di bawah kekuasaan Perikles, namun sejarah membuktikan berdampak buruk bagi Athena setelah masa kekuasaannya berakhir. Perikles, demikian kritik keras Plato, sebagai pemimpin telah gagal menjaga “kewarasan” warga Athena yang dibutakan oleh berbagai *privillige* yang dimiliki Athena ketika itu, sehingga mudah tergoda oleh berbagai gratifikasi jangka pendek alih-alih memastikan polis mereka tetap aman dan berkelanjutan (Grube, 1997).

Dari penjelasan ringkas di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) seperti halnya dokter, seorang pemimpin harus bekerja untuk kepentingan warganya dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. (b) pemimpin harus bisa menciptakan keseimbangan di antara berbagai tujuan, kepentingan dan kelompok yang berbeda-beda. (c) pemimpin harus mampu menghadapi tendensi untuk memilih kebijakan-kebijakan dengan keuntungan jangka pendek. (d) pemimpin harus merupakan seorang ahli dalam bidangnya (*expertise*). (e) pemimpin harus mampu mempersuasi rakyatnya untuk memahami hasil diagnosisnya dan sekaligus juga menerima “obat-obat” yang diberikannya (Scott dan Freeman, 2021).

2. **Pemimpin sebagai navigator kapal (*the navigator*).** Analogi pemimpin sebagai navigator ini dapat ditemui dalam dialog Plato berjudul *Gorgias*, *Republic* dan *Statesman*. Perumpamaan ini sebenarnya sudah cukup dikenal orang, termasuk di Indonesia, antara lain lewat lagu Perahu Retak ciptaan Emha Ainun Nadjib (kemungkinan memang diinspirasi dari analogi Plato ini). Ide intinya adalah sebuah negara diibaratkan dengan kapal, rakyat sebagai penumpang kapal yang hendak menuju suatu tempat (cita-cita bangsa), dan tugas seorang pemimpin layaknya navigator yang memberi panduan arah perjalanan menuju destinasi tertentu sekaligus tantangan yang mungkin muncul sepanjang jalan. Namun tugas seorang navigator dalam pandangan Plato tidak berhenti sampai disitu, tapi sekaligus juga sebagai kapten kapal yang bertugas menjaga ketertiban para awak kapal (penyelenggara negara) pun penumpangnya; dan sebagai jurumudi (nakhoda) yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan sebuah kapal (Rowe, 1997).

Berdasarkan pemaparan ringkas di atas maka dapat ditarik beberapa prinsip sebagai berikut: (a) warga negara sebagai *stakeholder* telah menetapkan sebuah tujuan, maka tugas pemimpin adalah membuat rencana perjalanan dan sekaligus juga mengawalinya hingga sampai dengan selamat di tujuan. (b) pemimpin, sebagaimana halnya navigator, tidak memikirkan keuntungannya sendiri melainkan keselamatan penumpang hingga tiba dengan selamat di tujuan. (c) menjadi pemimpin mensyaratkan keahlian tertentu (*expertise*). Dalam konteks ini keahlian dalam membaca pergerakan bintang-bintang, pergantian musim, arah angin dan sejenisnya. Tapi tidak hanya itu ia juga mesti mampu menjaga ketertiban kapal dan mengoperasikan kapal. (d) lagi-lagi, seperti halnya dokter yang menyampaikan diagnosis dan obat yang memaksa pasien keluar dari *comfort zone*-nya, keahlian yang dimilikinya bisa jadi tak bisa diterima sepenuhnya oleh penumpang yang bahkan menganggapnya sebagai *stargazer* (cemoohan oleh orang awam terhadap profesi navigator). (e) pemimpin tidak takut untuk terasingkan dari kerumunan, berani tidak populer, karena keahliannya dalam membuat keputusan-keputusan yang tegas dan tepat. Pemimpin juga harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan kerumunan sehingga ketertiban terjaga. Pemimpin juga semestinya memiliki kekuatan persuasi sehingga tercipta kesatuan di antara berbagai kelompok yang ada (Scott dan Freeman, 2021).

3. **Pemimpin sebagai seniman (*the artist*).** Analogi ini juga dapat ditemukan dalam dialog berjudul *Republic*. Model ini, bersama-sama dengan model pemimpin sebagai gembala (*the shepherd*), mungkin adalah yang paling kontroversial karena mengindikasikan pemimpin yang totalitarianistik—sebagaimana dituduhkan oleh, antara lain, Karl Popper. Menurut Plato, seorang pemimpin sejati tak ubahnya seniman (lebih tepatnya pelukis) yang hendak menciptakan suatu karya *masterpiece* berupa tatanan masyarakat yang berkeadilan, teratur dan harmonis mendekati kesempurnaan tanpa cacat. Ibarat kanvas untuk melukis, seorang pemimpin sebagai seniman hendak mengekspresikan idealisme yang dimilikinya ke dalam tatanan masyarakat dan institusi pemerintahan yang dipimpinya, bila perlu melalui proses reformasi yang menyeluruh. Dengan demikian, sosok pemimpin seperti ini berlawanan dengan pemimpin demagog (yaitu pemimpin yang sekadar pandai berorasi dan memanipulasi emosi dan prasangka pemilihnya lewat janji-janji palsu), melainkan sosok pemimpin yang sebelum mempromosikan program-program idealistiknya telah terlebih dahulu memanifestasikannya ke dalam kehidupan pribadinya (Grube, 1997). Dalam konteks ini seorang pemimpin yang baik mestilah seorang pemimpi layaknya Martin Luther (ketika menceritakan mimpinya bahwa orang kulit hitam dan kulit putih bisa berdiri sejajar) atau Mahatma Gandhi (yang memimpikan kemerdekaan India lewat jalan damai).

Namun persis pada titik inilah kontroversi dimulai, karena secara tidak langsung hal ini memiliki tendensi pada kekuasaan yang totalitarianistik. Apalagi kemudian Plato mengatakan bahwa sebagai seniman yang hendak melukis, maka langkah pertama yang perlu dilakukannya adalah memastikan “kebersihan” kanvasnya (bandingkan

dengan genosida atau *ethnical cleansing* Adolf Hitler atau Israel saat ini). Ketika dipraktikkan dalam ranah politik hal ini berarti pengambil-alihan secara paksa aset-aset orang kaya untuk dikuasai oleh negara, dan hanya menyisakan secukupnya untuk kebutuhan mendasar. Tak berhenti sampai disitu, Plato juga hendak mengambil paksa semua anak untuk kemudian dididik oleh negara sebagai calon-calon pemimpin masa depan sesuai dengan kapasitasnya. Hanya dengan cara demikian maka privatisasi aset dan privatisasi emosional dapat dihapuskan seutuhnya, dan negara dapat benar-benar tumbuh menjadi kuat. Namun merupakan kesalahan untuk menyamakan Plato begitu saja dengan sosok-sosok pemimpin totaliter abad 20, sebagaimana tuduhan Popper di atas, sebab visi negara yang hendak dibangunnya harmoni sosial, keadilan dan persahabatan sipil (*civic friendship*). Plato juga tidak pernah menyatakan bahwa visinya perihal negara ideal (yang berbau utopis karena memang mustahil dipraktikkan dalam realitas) sebagai blueprint yang harus dipaksakan dalam realitas, melainkan sekadar model ideal yang bisa diambil sebagian untuk kemudian dimodifikasi sesuai keperluan. Dalam hal ini pemimpin sebagai seniman bisa disamakan dengan sosok seorang arsitek yang telah memiliki sketsa dan denah rumah yang lengkap namun dalam prakteknya di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi tanah, ketersediaan material, kemampuan tukang, dan tentu saja kebutuhan dari si pemilik rumah, yaitu rakyatnya sendiri.

Berdasarkan pemaparan ringkas di atas maka dapat diambil beberapa prinsip sebagai berikut: (a) pemimpin haruslah seorang pemimpi (*dreamer*) dengan visi yang melampaui zamannya. (b) seorang pemimpin harus mampu melepaskan dirinya dari belenggu tekanan yang ada dalam mempertahankan visi idealnya tersebut, sekalipun dengan konsekuensi ia akan dianggap aneh bahkan dijauhi oleh masyarakat yang terlanjur nyaman (*comfort zone*) dengan situasinya saat itu. (c) pemimpin sebagai seniman bukanlah sosok pemimpin yang hipokrit (munafik), dalam artian apa yang dikatakannya telah dipraktikkan ke dalam kehidupannya sendiri, memimpin dengan teladan, otentisitas dan integritas. (d) dalam “membersihkan” sebuah negara atau institusi yang dipimpinnya, seorang pemimpin harus bisa memosisikan dirinya layaknya seorang arsitek yang harus mampu mengkompromikan visi idealnya dengan keadaan riil di lapangan termasuk dengan kebutuhan si pemilik rumah (rakyat). Hal ini agar rumah (negara) yang dibangun pada satu sisi sesuai dengan sketsa dan denah yang telah dibuat, namun di sisi lain memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Jangan sampai membuat “istana dengan cara menghancurkan kota” (Scott dan Freeman, 2021).

4. **Pemimpin sebagai guru (*the teacher*).** Di antara yang lain, model kepemimpinan ini mungkin adalah yang paling populer tapi juga paling kerap disalah-pahami. Untuk memahami secara lebih baik maksud Plato disini, perlu terlebih dahulu dijelaskan pandangannya perihal makna guru dan pendidikan itu sendiri. Menurutnya, pendidikan bukanlah sekadar mengajar dan menghafal (*simple minded instruction or rote learning*) melainkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu

(*expert* dalam suatu bidang) lalu mencoba membawa orang lain ke dalam level pemahaman yang sama dengan dirinya. Seorang guru yang baik mestilah memiliki penghargaan intelektual terhadap muridnya, tidak mencoba “menggurui” tapi sebagai rekan diskusi yang membawa mereka kepada kesimpulan yang benar secara argumentatif. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin mestilah terbuka terhadap berbagai pertanyaan interogatif yang dialamatkan kepadanya; memiliki kejujuran dan kedermawanan intelektual; dan di atas itu semua, tidak melakukan pemaksaan, indoktrinasi, apalagi manipulasi terhadap rakyatnya sendiri untuk mempercayai sesuatu yang tidak rasional (Grube, 1997). Untuk memahami lebih jauh makna pendidikan bagi Plato adalah melalui alegori gua nya yang terkenal, hal ini akan penulis bahas lebih jauh pada bab berikutnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa terdapat *perspective gap* antara pemimpin (guru) dengan rakyatnya (muridnya). Pemimpin seperti ini biasanya dikenal juga sebagai sosok *social-reformer* dan intelektual publik. Seorang pemimpin semestinya memiliki kemampuan abstraksi yang mumpuni dan sekaligus juga kemampuan berkomunikasi yang baik (selayaknya guru di dalam kelas) sehingga ia bisa meyakinkan rakyatnya dalam menerima pandangan-pandangannya secara sukarela (penuh kesadaran), sehingga program-program yang diusungnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini, tentu saja, tidaklah semudah yang dikatakan mengingat level pemahaman rakyat yang masih rendah sehingga pemimpin akan mendapatkan resistensi yang keras. Namun Plato mengingatkan bahwa peran seorang pemimpin yang baik memang sepatutnya mengusik zona nyaman (*comfort zone*) rakyatnya dalam rangka mengusung mereka ke taraf kehidupan yang lebih baik. Dalam dialog *Laws*, Plato memberi penekanan bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu “mendidik” rakyatnya terutama lewat hukum yang ditegakkan secara adil (Saunders, 1997).

Pemimpin sebagai guru memiliki beberapa prinsip sebagai berikut: (a) pemimpin mau tak mau harus berkonfrontasi dengan rakyatnya mengingat mereka masih menjadi “tawanan” dari zona nyamannya sendiri (ingat alegori gua Plato). (b) pemimpin harus sudah keluar dari zona nyamannya sendiri (belunggu manusia gua), sebelum kemudian meminta para pengikutnya melakukan hal yang sama. (c) pemimpin memicu rasionalitas rakyat yang dipimpinnya. Mereka mesti terbuka pada berbagai pertanyaan interogatif yang ada. (d) pemimpin sebagai reformer sosial dan intelektual publik sudah barang tentu menghadapi resistensi yang keras, karena tugas seorang pemimpin bukanlah menyenangkan rayatnya dengan gratifikasi instan (layaknya pemimpin demagog atau pemimpin transaksional) melainkan membawa mereka kepada *common good* yang dicita-citakan (Scott dan Freeman, 2021).

5. **Pemimpin sebagai gembala (*the shepherd*).** Model kepemimpinan ini sesungguhnya tidak sepenuhnya berasal dari Plato (Sokrates) melainkan dari lawan bicaranya Thrasymachus. Sebagaimana terdapat dalam dialog *Republic*, Thrasymachus mengkritik pandangan Sokrates perihal pemimpin sebagai dokter dan navigator yang

menggunakan keahliannya sepenuhnya untuk kebaikan rakyatnya, lalu sebagai *counter-attack* argumennya ia memberi metafora pemimpin sebagai gembala yang merawat dan melindungi hewan ternaknya (rakyatnya) namun itu semua pada akhirnya dilakukan untuk kepentingan si gembala sendiri dengan cara memakan atau menjualnya ke pasar hewan. Sokrates lalu memberikan bantahan lagi bahwa seorang gembala yang sebenarnya hanya merawat dan melindungi, akan halnya urusan jual-beli dan pemotongan itu adalah pekerjaan pedagang dan penjagal. Di sini Sokrates secara tegas membuat distingsi antara dua profesi yang berbeda (Grube, 1997).

Sejatinya analogi pemimpin sebagai gembala ini telah ada jauh sebelum masa Plato, dapat dilacak dalam tradisi agama Hebrew, Mesir Kuno dan Mesopotamia. Namun model ini tidak sepenuhnya cocok dengan pandangan Plato lainnya perihal pemimpin sebagai dokter, navigator dan guru, sebab berbeda ketiganya terdapat jurang pemisah yang tak tersatukan antara gembala (yang merupakan manusia) dengan hewan gembalanya (yang tidak memiliki akal layaknya manusia). Maka analogi pemimpin gembala ini juga digunakan Plato untuk mengkritik sistem demokrasi yang dianggap berpotensi melahirkan pemimpin tiran. Demikianlah dalam sistem demokrasi, mayoritas rakyat akan memilih sosok demagog yang mampu meraih simpati dan kepercayaan rakyat sebagai sosok pelindung dan penyelamat, namun setelah naik ke pucuk kekuasaan ia akan berdalih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengancam kekuasaannya, dan hal itu memberikannya legitimasi untuk menggunakan kekuatan militer bagi ambisi pribadinya.

Tidak mengherankan bila dalam dialognya yang berjudul *Statesman*, yang ditulis satu dekade setelah *Republic*, Plato mewanti-wanti agar seorang pemimpin berhati-hati ketika menggunakan model gembala ini. Model ini bisa saja berhasil apabila sosok pemimpin yang naik adalah individu yang mendapat kekuatan ilahiah sehingga menjadikan sosoknya berbeda dengan rakyatnya yang merupakan manusia biasa. Dengan kata lain, model ini cocok untuk pemimpin keagamaan tertentu yang menuntut kepercayaan dari umatnya, namun jelas tidak cocok untuk kepemimpinan politik pada umumnya (Scott dan Freeman, 2021).

6. **Pemimpin sebagai penenun (*the weaver*).** Model kepemimpinan sebagai perajut atau penenun ini dapat ditemukan dalam dialog Plato yang ditulis pada masa tuanya, *Statesman*. Berbeda dengan *Republic* yang temanya merentang luas, dalam dialog *Statesman* Plato memfokuskan pembahasannya pada satu tema kepemimpinan politis. Model kepemimpinan ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan model lainnya (pemimpin sebagai dokter, artis, navigator, guru) dalam hal ia tidak mensyaratkan keahlian tertentu dan tidak menjadikan pemimpin sebagai sosok yang terasing dari rakyatnya (dokter dengan diagnosis dan obatnya yang memaksa pasiennya untuk keluar dari zona nyamannya, navigator yang dipandang sebagai *stargazer* dan seterusnya). Untuk memahami lebih jauh maksud Plato ini, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat pekerjaan menenun yang berbeda dengan menjahit dan industri garmen

pada umumnya. Seorang penenun mesti mahir menggunakan dua jenis benang: benang lusi (*warp*) yang tebal dan kaku berfungsi menjadi tulang punggung kain yang dipasang secara membujur; dan benang pakan (*woof*) yang lebih tipis dan lentur namun berwarna-warni dan berfungsi untuk mengikat benang lusi sehingga membentuk kain dengan pola tertentu yang dipasang secara horizontal. Demikianlah hakikat pemimpin sebagai penenun, haruslah mampu mempersatukan berbagai karakter orang sehingga dapat membentuk tim, organisasi atau negara yang kuat dan bertahan lama (*durable*) (Rowe, 1997).

Secara umum Plato membedakan dua jenis manusia, jenis pertama adalah manusia “merpati” yang cenderung lembut, moderat dan damai; jenis manusia kedua adalah manusia “elang” yang cenderung berani, kuat, dan agresif. Kedua karakter manusia ini termasuk ke dalam empat kebijaksanaan utama Plato (*four cardinal virtues*) yang sifatnya saling memperkuat, *temperance* (moderasi) dan *andreia* (keberanian) pada sisi yang lain. Walaupun berbeda bahkan bertentangan namun kedua kualitas kemanusiaan ini diperlukan dalam rangka membentuk negara yang kuat. Tugas seorang pemimpin adalah “menenun” keduanya sehingga membentuk satu kesatuan, sehingga tidak ada yang terlalu ekstrim—elang tidak terlalu agresif, dan merpati tidak terlalu jinak. Untuk melakukan hal ini Plato menekankan pentingnya toleransi pada sosok pemimpin dalam menghadapi perbedaan yang ada; dan tak kalah pentingnya seorang pemimpin harus bisa menanamkan nilai-nilai tersebut pada para pengikutnya. Kesamaan nilai inilah yang akan mengikat dua jenis manusia tersebut dalam kesatuan yang kuat. Seorang pemimpin juga mesti memiliki ketegasan pada pihak-pihak yang terlalu ekstrim sehingga berpotensi merusak kesatuan yang telah terbina. Lain dari itu, Plato juga menekankan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk memiliki kedua karakter ini dengan sama baiknya, pemimpin sebagai sosok ideal yang cinta damai sekaligus juga tak segan bertindak agresif bila diperlukan (Rowe, 1997).

Berdasarkan pemaparan ringkas di atas maka dapat ditarik kesimpulan beberapa prinsip sebagai berikut: (a) seorang pemimpin merajut berbagai perbedaan yang terdapat dalam masyarakatnya, utamanya antara kelompok merpati dan elang. (b) kerjasama dan kesatuan di antara kelompok berbeda hanya mungkin terwujud apabila keduanya berbagi nilai yang sama. (c) seorang pemimpin harus mampu bertindak tegas terhadap “benang” tertentu yang tidak bisa menyesuaikan yang tidak bisa menyesuaikan bahkan cenderung merusak pola kain yang telah terbentuk. (d) pemimpin yang baik haruslah pertama-tama mampu merajut keutamaan-keutamaan yang terdapat baik dalam kelompok merpati maupun elang ke dalam karakternya sendiri (Scott dan Freeman, 2021).

7. **Pemimpin sebagai penabur benih (*the sower*).** Pemikiran Plato perihal pemimpin sebagai penabur dapat ditemukan dalam dialognya berjudul *Phaedrus* yang ditulis beberapa saat setelah *Republic*. Dalam dialog ini Plato memberikan gambaran yang indah perihal jiwa manusia yang dianalogikannya dengan sebuah kereta yang ditarik

oleh sepasang kuda bersayap berwarna hitam (yang melambangkan kecenderungan jiwa manusia pada kenikmatan materiil) dan putih (sebagai lambang jiwa manusia yang cenderung pada hal-hal yang spiritual). Kaitannya dengan pemimpin sebagai penabur, Plato hendak mengatakan bahwa kontribusi dan legasi terbaik yang bisa diberikan seorang pemimpin adalah ketika ia mampu mentransformasikan rakyatnya menjadi versi terbaik dirinya sendiri (sesuai dengan potensi setiap orang yang berbeda-beda). Dalam konteks ini Plato membedakan tiga jenis tanah (simbolisasi potensi setiap manusia yang berbeda-beda), ada tanah subur yang dengan mudah menerima bibit sehingga dapat tumbuh dengan subur (simbol manusia yang memiliki kecerdasan dan semangat); tanah yang kering sehingga bibit tidak bisa tumbuh sama sekali atau mati secara premature (simbol manusia yang jiwanya dikendalikan oleh epitumia yang cenderung pada hal-hal materiil); dan tanah yang kurang subur, seperti tanah merah atau sabana, yang mampu menerima bibit tapi tidak bisa tumbuh secara maksimal karena kurangnya unsur hara (simbol manusia yang bersemangat atau tertarik pada keindahan dan kebenaran tapi tidak cukup cerdas untuk menangkap makna yang tersirat) (Nehamas dan Woodruff, 1997).

Sekilas model kepemimpinan ini sama dengan pemimpin sebagai guru. Namun Plato memberikan distingsi yang jelas di antara keduanya: pemimpin sebagai guru fokus pada hubungan antara seorang pemimpin dengan pengikut langsungnya, lewat mekanisme pola komunikasi yang rasional dan relasi *top-down*; sementara pemimpin sebagai penabur memiliki jangkauan yang lebih luas hingga mencakup generasi berikutnya lewat skema pengembangan ide dan pemikiran, dan relasi yang lebih organik dan interaktif. Tidak mengherankan bila model kepemimpinan ini lebih tepat diaplikasikan pada pemimpin dalam hal pemikiran (*the thought leader*) karena sifatnya yang lebih ide-sentris. Contoh model kepemimpinan ini dapat dilihat pada kasus Sokrates dan Plato sendiri lewat dialog-dialognya yang memungkinkan bukan saja murid-murid langsungnya tapi juga generasi setelahnya yang membaca dengan seksama hasil karyanya, sebagai pewaris pemikirannya, untuk kemudian mengembangkannya sedemikian rupa sehingga relevan dengan kondisi dan situasinya yang sedang dihadapinya sendiri (Nehamas dan Woodruff, 1997). Walaupun Plato sendiri, dan gurunya Sokrates, tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin politik yang berhasil (Plato pernah mendapat kesempatan menjadi penasihat politik Raja Dionysus I dan II di Syracuse, tapi berujung pada kegagalan) tapi di usia tuanya ia berhasil mendirikan pusat pendidikan filsafat (yang mencakup ilmu-ilmu lainnya ketika itu) bernama Akademia, yang mampu bertahan berabad-abad setelahnya dan menginspirasi lahirnya berbagai lembaga serupa, seperti Lyceum yang didirikan oleh murid Plato sendiri, Aristoteles (yang mengambil jalan berbeda dengan gurunya yang rasional-abstrak, sementara ia sendiri lebih rasional-empiris), hingga pusat pendidikan aliran Stoisme dan Epicureanisme, bahkan menjadi model berbagai universitas modern. (Nehamas dan Woodruff, 1997).

Dari sini dapat diambil kesimpulan beberapa prinsip pemimpin sebagai penabur benih, sebagai berikut: (a) seorang pemimpin yang besar harus memiliki pemikiran-pemikiran yang besar pula sebagai legasi bagi bangsa kedepannya. (b) pemimpin besar tak segan mundur ke belakang apabila sudah saatnya, dalam rangka memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil ide, melakukan inovasi dan mengambil inisiatif yang sesuai dengan tantangan zamannya. (c) seorang pemimpin harus memberdayakan orang-orang di bawah kepemimpinannya. (d) dan akhirnya seorang pemimpin juga harus bisa mentoleransi mutase (mutation), dalam artian membiarkan orang lain mengubah dan memodifikasi idenya menjadi sesuatu yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan (Scott dan Freeman, 2021).

Pendidikan Kader Pemimpin

Plato adalah murid setia dari Sokrates yang merupakan penganut paham dualisme jiwa-tubuh. Berbeda dengan kecenderungan para filsuf alam sebelumnya yang memandang bahwa segala sesuatu (termasuk jiwa) mestilah berasal dari suatu unsur yang tunggal (*arkhe*) yang bersifat material (dapat diamati), maka bagi Sokrates tubuh dan jiwa memiliki hukumnya masing-masing. Sokrates percaya bahwa di dalam jiwa manusia terkandung jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia, hanya saja kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini—tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri—dan karenanya diperlukan proses pendidikan yang memanusiakan manusia dengan menggunakan metode *maieutics*—semacam metode tanya-jawab ala Sokrates yang dapat memicu lahirnya jawaban dari dalam diri penanya itu sendiri (Wibowo, 2010).

Metode *maieutics* ala Sokrates ini dapat diibaratkan dengan pekerjaan seorang bidan, dimana perannya dalam proses persalinan hanyalah sebatas membantu si ibu dalam melahirkan bayinya. Di kesempatan lain Sokrates juga mengibaratkan perannya sebagai seorang pemahat patung, dimana tugas seorang pemahat hanyalah “membentuk” dari unsur-unsur yang sudah tersimpul dalam diri masing-masing. Metode ini kemudian dikembangkan sedemikian rupa oleh Carl Rogers (1943) dalam psikoterapi modern, yang disebut dengan teknik konultasi non-direktif dimana si pasien dapat menyadari dan menyelesaikan persoalan-persoalan psikologisnya sendiri (Sarwono, 2015).

Di tangan Plato ajaran dualisme jiwa-tubuh mencapai puncaknya melalui konsepnya perihal trikotomi *psyche* atau jiwa yang kemudian diaplikasikan pula pada pandangannya perihal kelas-kelas pada masyarakat. Unsur pertama adalah *logistikon*, yaitu, kemampuan untuk berpikir secara rasional, dengan pusatnya pada bagian leher ke atas (kepala, pikiran manusia); unsur kedua *thumeticon*, yaitu, kemampuan untuk berkehendak dan kehormatan, dengan pusatnya terletak di bagian dada (bagian perut ke atas); dan unsur ketiga *abdomen* atau *epithumia*, yaitu, kemampuan untuk berkeinginan yang diasosiasikan dengan kebutuhan dasar dan keinginan duniawi, seperti, nafsu makan-minum dan berhubungan badan, dengan pusatnya terletak di bagian perut ke bawah. Kaitannya dengan filsafat politik, Plato mengaplikasikan trikotomi *psyche* ini kepada klasifikasi masyarakat yang ideal, dimana para filsuf yang memiliki keutamaan secara *logistikon* menjadi pemimpin bagi masyarakat; para tentara dan polisi yang memiliki keutamaan dalam hal *thumeticon* menjadi pelindung bagi

masyarakat; dan para pekerja dan pedagang yang memiliki keutamaan dalam hal *abdomen* bertugas untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan sehari-hari masyarakat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hanya akan bisa berhasil apabila dipimpin oleh orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin, dalam hal ini memiliki keutamaan secara logistikon dan sekaligus juga mampu “melampaui” keinginan-keinginan *thumeticon* dan *abdomen* (Berlina, 2025).

Sekilas pada titik ini dapat dipahami pandangan Plato terkait karakter kepemimpinan yang sudah ada secara *taken for granted* atau *natural born leader*, bahwa ada beberapa orang yang memang terlahir untuk menjadi pemimpin dikarenakan kualitas-kualitas yang inheren pada dirinya sendiri (bukan karena sekadar faktor hubungan keluarga atau oligarki). Bahwa negara hanya akan bisa berhasil apabila dipimpin oleh orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin, dalam hal ini memiliki keutamaan secara logistikon dan sekaligus juga mampu “melampaui” keinginan-keinginan *thumeticon* ataupun *abdomen* (*epithumia*). Istilah “melampaui” ini penting untuk ditekankan mengingat dalam skema pendidikan Plato seorang pemimpin yang ideal mestilah memiliki kemampuan-kemampuan yang dimiliki dari kelompok *abdomen* (*epithumia*) dan *thumeticon*, serta memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh keduanya, yaitu, logistikon. Proses seleksi ini dapat terjadi secara alamiah melalui suatu skema pendidikan ala Plato.

Berdasarkan pemaparan ringkas di atas dapat dipahami bahwa Plato berbicara politik tidak secara praktis melainkan paradigmatis—ia menawarkan sebuah cara berpikir baru agar polis Athena yang dicintainya dapat keluar dari krisis zamannya. Dalam dialog *Republic*-nya, Plato menyatakan bahwa suatu polis yang ideal dapat muncul secara niscaya seiring dengan adanya sistem pendidikan yang ideal pula sehingga melahirkan manusia-manusia terbaik dalam bidangnya masing-masing dengan filsuf-raja (*the philosopher-king*)—lulusan terbaik dari yang terbaik—sebagai pemimpinnya. Haryanto Cahyadi merumuskan setidaknya terdapat empat masalah besar yang dihadapi Plato ketika itu: 1. Pertikaian internal di dalam polis Athena sendiri akibat tidak adanya sosok negarawan *kaloskagathos*. 2. Gagalnya para pemimpin dalam mengemban tanggung jawab mendidik warga negaranya. 3. Ketidadaan model yang bisa dijadikan pegangan oleh warga dalam merawat polisnya sendiri. 4. Tercemarnya figur filsuf sejati akibat maraknya para filsuf gadungan yang memperjual-belikan ilmu dan menimbulkan kekacauan (Wibowo dan Cahyadi, 2014).

Pada titik inilah Plato mengajukan proposal pendidikan *paideia*-nya, yang didasarkan pada pandangannya perihal keutamaan jiwa manusia. Baginya pendidikan (*paideia*) bukan sekadar mencangkakan ilmu pada anak didik—seperti mengunduh program pada computer atau memberikan penglihatan pada mata—melainkan suatu proses “peristrophe” atau konversi (pembalikan arah) dan “periagoge” (pengembalian kembali arah) penglihatan anak didik sehingga mereka melihat pada arah yang seharusnya, tepatnya kepada cahaya kebaikan yang terang-benderang (*ton agathon*). Bahwa pendidikan bukan memberi penglihatan pada mata supaya dapat melihat, melainkan persoalan bagaimana mata itu dapat melihat ke arah yang baik dan benar, kepada realitas sejati alih-alih bayangan di dinding gua belaka. Hanya setelah “mata” anak didik dapat melihat ke arah yang benar maka seluruh tubuh manusia akan berjalan menuju kepada kebaikan yang didambakan (Wibowo dan Cahyadi, 2014).

Plato, sebagaimana gurunya Sokrates dan muridnya Aristoteles, menekankan hakikat manusia sebagai binatang-sosial (*zoon politicon*), dan karenanya salah-satu tolak-ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan ialah bilamana bermanfaat untuk kehidupan politik (yaitu kehidupan sosial seluruhnya). Hal ini membawanya pada pemikiran etika tentang bagaimana seharusnya seseorang bisa hidup dengan baik alih-alih sekadar “menumpang” hidup di dunia ini. berdasarkan etika Plato, seseorang dapat dikatakan telah hidup secara baik bilamana tindak-tanduknya dikuasai oleh akal-budi, dan sebaliknya buruk bila dikendalikan hawa nafsu nya. Lalu apa yang dimaksud dengan akal budi itu sendiri? Menurut Plato ialah kemampuan jiwa manusia dalam melihat realitas sejati. Lebih jauh ia juga menekankan bahwa kecenderungan untuk hidup secara baik seperti ini (yaitu hidup berdasarkan tuntunan akal budi) tidaklah perlu dipaksakan (apalagi dengan kekerasan), ibarat makanan enak maka tugas seorang guru cukuplah membimbing muridnya untuk mencicipi makanan enak tersebut dan dengan sendirinya si murid akan cenderung mencari nya sendiri alih-alih pada makanan kasar (simbol nafsu materi) yang biasa dimakannya (Yasser, 2015).

Satu hal yang menarik dari filsafat pendidikan Plato adalah, sekalipun bagi Plato bentuk negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh pemerintahan otokratis dengan filsuf-raja sebagai pemimpin tunggalnya sekaligus sumber hukumnya, tapi karakter pendidikannya sendiri bersifat sangat demokratis. Artinya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi filsuf raja, baik itu anak pejabat ataupun orang biasa, sebab hanya yang terbaik di antara merekalah yang berhak menjadi pemimpin tertinggi sebuah negara. Dengan demikian sistem pendidikan Plato yang demokratis menjadi semacam ajang seleksi untuk menentukan siapa yang berhak memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang otokratis. Dengan kata lain, pendidikan bagi Plato memiliki fungsi politis, dimana keberhasilan sebuah negara (*polis*) sepenuhnya bergantung pada keberhasilan suatu sistem pendidikan dan merupakan tanggungjawab pendidikan untuk melestarikan sebuah negara yang berdaulat, dimana tujuan pendidikan lebih dari sekadar membentuk individu-individu terbaik tapi juga memiliki kesadaran untuk mengabdikan pada negara. Untuk itu maka biaya penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan sebaliknya negara berhak atas pendidikan setiap anak (termasuk merenggut mereka sejak usia 7 tahun dari keluarganya untuk dididik sesuai kemampuannya) (Yasser, 2015).

Untuk menyokong hal ini maka Plato membagi proses pendidikan tersebut menjadi tiga tahapan besar, yaitu tahap dasar antara 7-20 tahun; tahap militer antara 20-30 tahun; dan tahap pendidikan filsuf pada usia 30-35 tahun untuk selanjutnya mengabdikan sebagai pemimpin-pemimpin pemerintahan; dan akhirnya pada usia 50 tahun, yang terbaik di antaranya (*best of the best*), akan terpilih sebagai pemimpin tertinggi yaitu filsuf-raja dimana kata-katanya adalah hukum tertinggi. Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang gagal di ujian militer (pada usia 20 tahun) dan filsafat (dalam usia 30)? Mereka akan mengabdikan pada negara dan ditempatkan dalam pos yang sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu dalam kelompok pekerja atau dalam pos militer yang lebih elit. Pembagian kerja seperti ini penting sebab dalam negara ideal yang dimaksud Plato, dasar negara yang sukses adalah kerjasama antara tiga kelompok masyarakat di atas berdasarkan potensinya masing-masing, dimana para pekerja mengikuti prinsip moderasi (kecenderungan pada keuntungan ekonomis dan

kesenangan-kesenangan fisik); para militer yang mengikuti prinsip keberanian (*lyches*) dalam menjaga stabilitas dan penegakan hukum; sementara para filsuf mengikuti prinsip kebijaksanaan (*sophia*) dan keadilan (*dikaiosune*) dalam menghasilkan keputusan dan aturan yang membawa kebaikan pada rakyatnya (Grube, 1997).

Dengan demikian, dalam pandangan Plato seorang pemimpin ideal mestilah sosok manusia terbaik dari generasinya yang memiliki kecenderungan pada kebenaran (*truth-seeking glance*). Namun seorang pemimpin juga mesti memiliki karisma tertentu sehingga dapat memperoleh keberhasilan dalam berbagai keputusan dan aksinya. Tanpa karisma pribadi maka seorang pemimpin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan dari rakyatnya. Karisma ini sendiri merupakan sesuatu yang mistikal, dalam artian ia tidak bisa diperoleh lewat jalur paksaan ataupun lewat pendidikan, melainkan sesuatu yang diperoleh sejak lahir (Takala, 1997). Perpaduan antara bakat pribadi dan seleksi pendidikan terbaik inilah yang disebut dengan *philosopher-king*, yaitu, individu yang memiliki pengetahuan sejati tentang kebenaran dan keadilan, sekaligus memiliki kebijaksanaan dan kecakapan yang diperlukan untuk memimpin negara. Menurut Plato, hanya seorang filsuf yang memiliki kemampuan untuk memahami esensi dari keadilan dan kebaikan yang paling layak memimpin (Andariati, 2020).

Dalam dialog *Republic*, Plato menggambarkan bagaimana negara yang ideal harus dibangun di atas prinsip keadilan, dimana setiap individu memiliki peran dan tugasnya masing masing berdasarkan keahlian dan kebajikannya. Dalam negara ini, kelas-kelas masyarakat dibagi menjadi tiga: para filsuf sebagai pemimpin, kelompok militer sebagai pelindung, dan para pekerja sebagai penyedia kebutuhan ekonomi. Masing-masing kelas ini memiliki perannya dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan negara, di mana keadilan akan tercapai ketika setiap individu menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya. Baginya, pendidikan bukan hanya sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga alat untuk membentuk karakter dan moralitas individu. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan rakyat yang mampu menjalani kehidupan yang adil. Plato percaya bahwa tanpa pendidikan yang benar, negara akan selalu dikuasai oleh ambisi pribadi dan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan menghambat terciptanya keadilan (Alkhadafi, 2025).

D. KESIMPULAN

Kekuasaan cenderung membuat seseorang menjadi arogan. Contoh sederhana, pengguna kendaraan bermotor dengan CC yang lebih besar (katakanlah mobil Pajero dan Fortuner atau Moge 250cc ke atas) yang kerap kali bertindak arogan di jalan raya dan tidak jarang ulahnya tersebut membahayakan pengguna jalan lainnya yang kendaraannya ber-CC lebih kecil. Atau juga dalam lingkup keluarga, seorang suami sebagai kepala rumah tangga seringkali merasa sebagai pihak yang paling tahu semua dan berjasa hanya karena ia menjadi penyedia tunggal sumber daya finansial bagi keluarganya. Dalam skala nasional, terdapat kecenderungan untuk menormalisasi arogansi kekuasaan seperti ini. Katakanlah, dewasa ini dianggap wajar bagi seorang kepala daerah bahkan negara untuk mempromosikan bahkan mendukung habis-habisan (bila perlu menggunakan fasilitas negara) kerabatnya sendiri (mulai

dari adik, istri hingga anak) untuk menggantikan posisinya di pucuk kekuasaan terlepas dari kompetensinya. Berbagai teori kepemimpinan dewasa ini juga kerap mengabaikan aspek moral seorang pemimpin, dan lebih menekankan pada nilai-nilai kepemimpinan yang efektif dan *result-oriented*. Lagi-lagi demokrasi (yang berbalut dengan kapitalisme) menjadi alat justifikasi penyalahgunaan kekuasaan seperti ini, dan kerap melahirkan sosok pemimpin demagog.

Disinilah letak pentingnya menggali kembali kebijaksanaan filsafat politik Plato yang secara tegas membuat distingsi antara pemimpin dengan tiran. Baginya seorang pemimpin mestilah sosok terbaik di antara para pengikutnya, memiliki keutamaan secara *logistikon* (dan melampaui keinginan-keinginan *thumos* ataupun *epithumia*), sehingga ia mampu bertindak selayaknya navigator, guru, dokter, seniman bahkan penggembala, penenun dan penebar benih bagi rakyatnya. Akan halnya seorang tiran hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri—demikian halnya dengan oligarki yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya—sehingga tidak layak untuk disebut dengan pemimpin. Plato juga mengkritisi sistem demokrasi karena cenderung untuk melahirkan pemimpin demagog yang seolah berpihak pada rakyat namun sesungguhnya seorang tiran. Untuk melahirkan sosok pemimpin yang ideal, demikian bagi Plato, diperlukan perpaduan dari bakat alamiah (*natural born leader*) dan sistem pendidikan yang baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alkhadafi, Rahmad, “Konsep Negara Ideal Plato dan Implikasinya terhadap Pendidikan Kepemimpinan Era Kontemporer”, dalam jurnal, *Insight: Indonesian Journal of Science Review*, Vol. 1, No. 1 Mei 2025, h. 11-23.
- Andariati, Leni, “Filsafat Politik Plato”, dalam, *Jurnal Review Politik*, Vol 10, No. 01, Juni 2020, h. 101-104.
- Bass, B. M., “From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision”, dalam jurnal, *Organizational Dynamics*, 18, (1990), h. 19-32.
[http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)
- Berlina, dkk, “Model Kepemimpinan Menurut Plato dan Relevansinya Terhadap Pemimpin Masa Kini”, dalam jurnal, *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Februari (2025),
- Dias, M. dkk, “From Plato to e-Leaders: The Evolution of Leadership Theories and Styles”, dalam jurnal, *Economics and Business Quarterly Reviews*, 5(2), (2022),
- Grube, G.M.A, “Republic”, dalam buku, John M. Cooper (ed.), *Plato Complete Work*, (USA: Hackett Publishing, 1997), h. 971-1223.
- Grube, G.M.A., “Apology,” dalam buku, John M. Cooper (ed.), *Plato Complete Work*, (USA: Hackett Publishing, 1997), h. 17-36.
- Mulky, Mohamad Asrori, “Jalan Politik Nabi Muhammad: Etika Kenabian dalam Krisis Kepemimpinan Global”, dalam jurnal, *Mathla’ul Fatah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2025), h. 1-16.

- Nehamas, Alexander dan Paul Woodruff, "Phaedrus", dalam buku, John M. Cooper (ed.), *Plato Complete Work*, (USA: Hackett Publishing, 1997), h. 506-556.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics*, (USA: Northwestern Univ. Press, 1988), h. 194-217.
- Pute, Jimmi Pindan, dkk, "Kajian Praktis Karakteristik Jiwa Seorang Pemimpin Berdasarkan Filsafat Tiga Unsur Jiwa Manusia", dalam jurnal, *Kinaa: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, Vol. 4, No. 2, Desember (2023), h. 110-126.
- Rowe, C.J, "Statesman", dalam buku, John M. Cooper (ed.), *Plato Complete Work*, (USA: Hackett Publishing, 1997), h. 294-358.
- Sarwono, Sarlito W., *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015).
- Saunders, Trevor J., "Laws", dalam buku, John M. Cooper (ed.), *Plato Complete Work*, (USA: Hackett Publishing, 1997), h. 1318-1616.
- Scott, Dominic dan R. Edward Freeman, *Models of Leadership in Plato and Beyond*, (USA: Oxford, 2021).
- Takala, Tuomo, "Plato and Charisma", dalam jurnal, *EJBO*, Vol. 2, No. 1 (1997).
- Wibowo, A. Setyo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Platon dari Yunani Antik hingga Indonesia*, (Bantul: Lamalera, 2014).
- Wibowo, A. Setyo, *Arete: Hidup Sukses Menurut Platon*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Wibowo, A. Setyo, *Paideia: Filsafat Pendidikan Platon*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Yasser, Muhammad, "Pendidikan Total, Demokratis dan Emansipatif dalam Filsafat Pendidikan Plato", dalam buku, *Pendidikan Islam: Filsafat dan Sejarahnya*, (Jakarta: YES, 2015).

Website

- <https://binus.ac.id/bandung/2022/08/konsep-plato-tentang-mendidik-pemimpin/>
- <https://darahseorangfilsuf.wordpress.com/2013/06/24/pendidikan-total-demokratis-dan-emansipatif-dalam-filsafat-pendidikan-plato-2/>
- <https://feb.ugm.ac.id/id/suara-akademisi/825-definisi-kepemimpinan-menurut-bass-refleksi-pada-diri-penulis>
- <https://www.netralnews.com/alasan-banjir-sumatera-belum-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>
- <https://www.sesawi.net/kepemimpinan-ala-plato/>
- <https://www.tempo.co/kolom/teladan-paus-fransiskus->
- <https://www.tempo.co/politik/pakar-geologi-ugm-jelaskan-penyebab-banjir-sumatera-bisa-berdampak-dahsyat>